

BAB II

KONDISI PENDIDIKAN PEREMPUAN PRIBUMI DI HINDIA BELANDA TAHUN 1900-1911

Pembahasan mengenai kondisi pendidikan perempuan pribumi di Hindia Belanda pada periode 1900-1911 tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya dan kebijakan kolonial yang membentuk akses perempuan terhadap pendidikan pada masa tersebut.⁶⁰ Pendidikan perempuan pada periode ini juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap peran perempuan serta sistem pendidikan kolonial yang berkembang di Hindia Belanda.⁶¹ Kondisi pendidikan perempuan pribumi pada sekitar tahun 1900 menjadi salah satu latar belakang munculnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan yang kemudian mendorong lahirnya berbagai gerakan dan organisasi perempuan, termasuk Organisasi Poetri Mardika pada tahun 1912.⁶² Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini tidak hanya menjelaskan kondisi pendidikan perempuan pribumi sebelum berdirinya Organisasi Poetri Mardika, tetapi juga menggambarkan situasi sosial dan pendidikan yang melatarbelakangi munculnya perjuangan organisasi tersebut dalam bidang pendidikan perempuan.

Bab ini memuat tiga pokok persoalan utama. Pertama, kondisi sosial dan budaya perempuan pribumi yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan pada periode 1900-1911. Kedua, kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan perempuan pribumi yang menentukan arah dan batasan pendidikan pada masa kolonial. Ketiga, berbagai hambatan dalam memperoleh akses pendidikan yang dihadapi perempuan pribumi di Hindia Belanda. Melalui pembahasan ini, penulis berupaya memberikan gambaran umum mengenai kondisi pendidikan perempuan pribumi pada periode 1900-1911 sebagai landasan untuk memahami lahirnya perjuangan Organisasi Poetri Mardika dalam bidang pendidikan perempuan pada tahun 1912-1919.

⁶⁰ "Politiek Etis en Onderwijs," *Bataviaasch Nieuwsblad*, 12 Mei 1905.

⁶¹ Van Niel, Op. cit., hlm. 84.

⁶² "Perempoean dan Kemadjoean Bangsa," *Oetoesan Hindia*, 21 Oktober 1918.

2.1 Pandangan Sosial dan Budaya Terhadap Pendidikan Perempuan Pribumi

Pada periode 1900-1911, perempuan pribumi di Hindia Belanda masih hidup dalam lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem sosial tradisional.⁶³ Dalam struktur masyarakat kolonial, laki-laki dipandang sebagai pemimpin keluarga sekaligus pihak yang memiliki hak lebih besar untuk terlibat dalam kehidupan publik, sedangkan perempuan lebih diarahkan pada kehidupan domestik di lingkungan rumah tangga.⁶⁴ Kondisi tersebut menyebabkan perempuan pribumi belum memperoleh kebebasan penuh dalam menentukan kehidupannya, termasuk dalam memperoleh pendidikan formal.

Pandangan masyarakat terhadap perempuan pada masa itu berkaitan erat dengan peran yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan diharapkan tunduk kepada ayah, suami, maupun kerabat laki-laki lainnya serta menjalankan kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam budaya Jawa, perempuan dikenal dengan istilah *konco wingking*, yaitu teman di belakang yang bertugas mengurus urusan rumah tangga.⁶⁵ Selain itu, berkembang pula konsep *masak*, *macak*, dan *manak* yang menggambarkan peran utama perempuan sebagai pengelola rumah tangga, menjaga penampilan, serta melahirkan dan merawat anak.⁶⁶ Akibatnya, keberhasilan perempuan lebih banyak diukur dari kemampuannya menjalankan peran domestik dibandingkan tingkat pendidikan yang dimiliki.

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh struktur sosial kolonial yang membedakan masyarakat berdasarkan ras, gender, dan status sosial. Dalam sistem sosial Hindia Belanda, golongan Eropa menempati lapisan tertinggi, diikuti oleh golongan Timur Asing, sedangkan pribumi berada pada lapisan paling rendah.⁶⁷ Perempuan pribumi mengalami diskriminasi ganda karena selain berada dalam

⁶³ Blackburn. *Op. cit.*, hlm. 24-27

⁶⁴ Wiyatmi, "Perempuan dan Pendidikan dalam Perspektif Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia," *MOZAIK*, Vol. 13, No. 2 (2013). Hlm 112-114.

⁶⁵ Vreede-de Stuers, *Op. cit.*, hlm. 35-36.

⁶⁶ Siti Sundari, *Perempuan di Mata Perempuan: Perspektif Sajak-Sajak Toeti Heraty* (Yogyakarta: Ombak, 2016), hlm. 27-31.

⁶⁷ Locher-Scholten, *Op. cit.*, hlm. 52-54.

kelompok pribumi, mereka juga menghadapi berbagai pembatasan yang bersumber dari budaya patriarki. Akibatnya, kesempatan memperoleh pendidikan bagi perempuan pribumi menjadi lebih terbatas dibandingkan laki-laki maupun perempuan Eropa.

Perubahan mulai terlihat setelah pemerintah kolonial Belanda menerapkan Politik Etis pada tahun 1901. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap kritik terhadap praktik kolonial yang dianggap merugikan masyarakat pribumi. Politik Etis dikenal melalui tiga program utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi.⁶⁸ Dalam bidang pendidikan, pemerintah kolonial mulai membuka kesempatan belajar bagi masyarakat pribumi.⁶⁹ Meskipun demikian, pendidikan masih lebih diprioritaskan kepada laki-laki karena dianggap lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial. Sementara itu, perempuan pribumi masih dipandang tidak memerlukan pendidikan tinggi karena dianggap akan lebih banyak menjalankan peran domestik dalam keluarga.



Gambar 2. 1 Siswi *Inlandse Meisjesschool* di Bandung, sekitar tahun 1905 -1910

Sumber: KITLV Image Collection, KITLV A733.

Gambaran diatas mengenai perkembangan awal pendidikan perempuan dapat dilihat dari berdirinya sekolah-sekolah perempuan pribumi pada awal abad ke-20. Salah satu dokumentasi yang menunjukkan kondisi tersebut adalah foto siswi *inlandse meisjesschool* di Bandung sekitar tahun 1905-1910.⁷⁰ Keberadaan

⁶⁸ Ricklefs, Op. cit., hlm. 327-329.

⁶⁹ Locher-Scholten, Op. cit., hlm. 63.

⁷⁰ "Leerlingen van de Inlandse Meisjesschool, Vermoedelijk te Bandoeng." KITLV Image Collection, KITLV A733.

sekolah tersebut memperlihatkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan mulai berkembang setelah diterapkannya Politik Etis, meskipun kesempatan tersebut masih terbatas pada kalangan priyayi dan elite pribumi yang memiliki hubungan dengan pendidikan Barat.

Perkembangan awal pendidikan perempuan tersebut berlangsung bersamaan dengan semakin meluasnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi perempuan pribumi. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan gagasan tersebut adalah Raden Ajeng Kartini yang melalui surat-suratnya mengkritik berbagai hambatan yang membatasi perempuan untuk memperoleh pendidikan.⁷¹ Tradisi pingitan menyebabkan banyak perempuan pribumi harus menghentikan pendidikan pada usia muda sehingga kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kemampuan intelektual menjadi terbatas.⁷² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan perempuan mulai berkembang pada awal abad ke-20, berbagai hambatan sosial dan budaya masih membatasi kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan secara lebih luas.

Hambatan terhadap pendidikan perempuan tidak hanya berasal dari kebijakan kolonial, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pendidikan Barat sering dianggap dapat mengubah perilaku perempuan sehingga dikhawatirkan membuat mereka kurang patuh terhadap keluarga dan tidak mampu menjalankan peran domestik dengan baik.⁷³ Akibatnya, hingga sekitar tahun 1910 masih banyak keluarga pribumi yang enggan mengizinkan anak perempuan mereka mengikuti pendidikan formal.

Terbukanya akses pendidikan bagi sebagian perempuan pribumi sejak sekitar tahun 1908 mulai mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan. Perkembangan pendidikan modern serta munculnya

⁷¹ Kartini, Op. cit., hlm. 41.

⁷² Anita Rahmawaty, "Emansipasi dan Pendidikan Perempuan dalam Pemikiran R.A. Kartini," *PALASTREN*, Vol. 7, No. 2 (2014), hlm. 248-251.

⁷³ "Perempoean dan Pendidikan Barat," *Oetoesan Hindia*, 14 Oktober 1910.

kelompok perempuan terdidik mulai memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Kesadaran tersebut berkembang melalui surat kabar, majalah perempuan, dan berbagai media cetak yang mulai membahas pentingnya pendidikan perempuan pada periode 1908-1911.⁷⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan mulai dipandang sebagai sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial.

Kondisi pendidikan perempuan pribumi pada periode 1900-1911 menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kesempatan memperoleh pendidikan lebih banyak diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang berasal dari budaya patriarki dan pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik.⁷⁵ Akibatnya, sebagian besar perempuan pribumi belum memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan intelektual melalui pendidikan formal.

Perkembangan tersebut turut mendorong lahirnya berbagai organisasi perempuan pada awal tahun 1900 yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus perjuangannya. Organisasi-organisasi tersebut berupaya memperluas kesempatan belajar bagi perempuan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan perempuan. Dalam konteks inilah Organisasi Poetri Mardika didirikan di Batavia pada tahun 1912 sebagai salah satu organisasi perempuan pribumi yang secara aktif memperjuangkan pendidikan perempuan melalui penerbitan majalah, pemberian bantuan pendidikan, dan berbagai kegiatan sosial.⁷⁶

Dengan demikian, kondisi sosial dan budaya masyarakat Hindia Belanda pada periode 1900-1911 tidak hanya menyebabkan terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan pribumi, tetapi juga mendorong munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat. Kesadaran tersebut kemudian menjadi salah satu

⁷⁴ Shiraishi, *Op. cit.*, hlm. 51.

⁷⁵ Blackburn, *Op. cit.*, hlm. 33-36

⁷⁶ Ibid

faktor yang melatarbelakangi lahirnya Organisasi Poetri Mardika sebagai organisasi yang berupaya memperjuangkan pendidikan perempuan pribumi pada periode berikutnya.

2.2 Politik Etis dan Dinamika Kesadaran Pendidikan Perempuan Pribumi

Kebijakan pendidikan kolonial mengalami perkembangan setelah pemerintah kolonial Belanda menerapkan Politik Etis pada tahun 1901.⁷⁷ Kebijakan tersebut muncul setelah berkembangnya kritik terhadap praktik kolonial Belanda yang dianggap merugikan masyarakat pribumi, terutama pelaksanaan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*).⁷⁸ Belanda memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial perlu memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan pendidikan masyarakat pribumi.⁷⁹

Sebagai tindak lanjut dari kritik tersebut, pemerintah kolonial kemudian menerapkan Politik Etis pada tahun 1901 yang memiliki tiga program utama, yaitu irigasi, emigrasi, dan edukasi.⁸⁰ Dalam pelaksanaannya, program edukasi menjadi salah satu kebijakan penting karena pemerintah kolonial memandang pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan tenaga kerja pribumi terdidik yang dapat membantu kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial.⁸¹ Pada sekitar tahun 1901 hingga 1910, pemerintah kolonial mulai memperluas pembangunan sekolah-sekolah pribumi di beberapa wilayah Hindia Belanda meskipun pendidikan tersebut masih bersifat terbatas.⁸²

Perkembangan pendidikan pada masa Politik Etis secara perlahan memengaruhi munculnya kelompok pribumi terdidik di Hindia Belanda. Pendidikan kolonial mulai melahirkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan membaca, menulis, dan memahami perkembangan pemikiran

⁷⁷ Locher-Scholten. *Op. cit.*, hlm. 65.

⁷⁸ Van Niel. *Loc. cit.*

⁷⁹ Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid II*. Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 112.

⁸⁰ Locher-Scholten. *Op. cit.*, hlm. 67.

⁸¹ Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1996, hlm. 37.

⁸² Van Niel. *Op. cit.*, hlm. 86.

modern.⁸³ Pada periode 1905-1911, perkembangan pendidikan tersebut juga mulai memberikan pengaruh terhadap perempuan pribumi, terutama perempuan dari kalangan priyayi dan elite pribumi yang memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Barat.⁸⁴



Gambar 2. 2 Kegiatan Pembelajaran Siswi Pribumi di *Leerlingen van de inlandse meisjesschool*, Bandung, sekitar tahun 1905-1910

Sumber: KITLV Image Collection, KITLV A733.

Gambar tersebut memperlihatkan kegiatan pembelajaran siswi pribumi di sebuah sekolah perempuan pribumi *inlandse meisjesschool* berada di Bandoeng pada masa Hindia Belanda sekitar tahun 1905 -1910. Kehadiran sekolah perempuan tersebut menunjukkan perkembangan pendidikan perempuan setelah diterapkannya Politik Etis tahun 1901. Pendidikan tersebut menjadi salah satu sarana yang mendorong munculnya perempuan pribumi terdidik pada awal abad ke-20.

Perkembangan pendidikan pada masa Politik Etis turut memperluas penyebaran gagasan mengenai pentingnya pendidikan perempuan di kalangan masyarakat pribumi. Pemikiran Raden Ajeng Kartini yang mulai dikenal luas setelah penerbitan kumpulan surat-suratnya pada sekitar tahun 1904 memberikan pengaruh terhadap berkembangnya kesadaran bahwa perempuan juga memerlukan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kedudukannya dalam masyarakat.⁸⁵ Gagasan tersebut kemudian semakin berkembang di kalangan

⁸³ Shiraishi. *Op. cit.*, hlm. 24.

⁸⁴ Blackburn. *Op. cit.*, hlm. 31.

⁸⁵ Ibid.

masyarakat pribumi terdidik dan menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya perhatian terhadap pendidikan perempuan pada periode 1905-1911.

Selain melalui pendidikan formal, perkembangan kesadaran pendidikan perempuan juga didukung oleh munculnya media cetak pada periode 1905-1911. Surat kabar dan majalah mulai membahas persoalan pendidikan perempuan serta pentingnya peningkatan pengetahuan bagi perempuan pribumi.⁸⁶ Media cetak kemudian menjadi sarana bagi masyarakat pribumi untuk mengenal gagasan baru mengenai pendidikan dan kesetaraan perempuan.

Perkembangan pendidikan pada masa Politik Etis menunjukkan mulai terbukanya kesempatan bagi perempuan pribumi untuk memperoleh pendidikan, meskipun akses tersebut masih terbatas dan belum dinikmati secara merata. Bertambahnya jumlah sekolah serta meningkatnya perhatian terhadap pendidikan perempuan menunjukkan adanya perubahan pandangan mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya kesadaran baru di kalangan perempuan pribumi mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kedudukan sosial mereka.

Perubahan tersebut menunjukkan mulai terbukanya kesempatan pendidikan bagi perempuan yang sebelumnya lebih banyak dibatasi oleh norma sosial dan budaya patriarki. Dalam teori *critical consciousness*, kondisi ini mencerminkan tahap awal dari proses penyadaran di mana terbukanya akses pendidikan menjadi titik mula bagi perempuan pribumi untuk mulai mempertanyakan ketimpangan yang selama ini mereka terima sebagai hal yang wajar.⁸⁷ Oleh karena itu, perkembangan pendidikan pada masa Politik Etis dapat dipahami sebagai salah satu langkah awal yang mendorong terbukanya kesempatan yang lebih luas bagi perempuan pribumi untuk memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Perkembangan pendidikan pada masa Politik Etis juga menunjukkan bahwa perempuan pribumi mulai memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan

⁸⁶ Kartowijono, S. (1977). *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.

⁸⁷ Freire, Op. cit., hlm. 17.

dan terlibat dalam perkembangan pemikiran modern. Meskipun akses pendidikan perempuan pada periode 1901-1911 masih terbatas, perkembangan tersebut menjadi langkah awal munculnya perempuan pribumi terdidik yang kemudian memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan kesetaraan perempuan.

Pada sekitar tahun 1908 hingga 1911, perkembangan pendidikan dan munculnya kelompok perempuan pribumi terdidik mulai mendorong lahirnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan perempuan.⁸⁸ Kesadaran tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya organisasi perempuan, termasuk Organisasi Poetri Mardika yang berdiri pada tahun 1912 dan menjadikan pendidikan perempuan sebagai bagian penting dari perjuangannya.⁸⁹

Dengan demikian, penerapan Politik Etis sejak tahun 1901 tidak hanya memengaruhi perkembangan sistem pendidikan kolonial di Hindia Belanda, tetapi juga mendorong munculnya dinamika kesadaran pendidikan perempuan pribumi. Perkembangan pendidikan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam lahirnya perempuan pribumi terdidik dan berkembangnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan serta kesetaraan perempuan dalam masyarakat kolonial.

2.3 Kebijakan Politik Etis dalam Bidang Pendidikan

Sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada periode 1901-1911 memiliki sifat diskriminatif dan hierarkis.⁹⁰ Sistem tersebut dibentuk berdasarkan struktur sosial kolonial yang membagi masyarakat ke dalam beberapa golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi.⁹¹ Pembagian tersebut tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menentukan akses pendidikan bagi setiap kelompok masyarakat. Akibatnya, setiap golongan memperoleh kualitas pendidikan, kurikulum, serta kesempatan pendidikan yang berbeda dalam sistem pendidikan kolonial.

⁸⁸ Shiraishi. *Op. cit.*, hlm. 51.

⁸⁹ Vreede-de Stuers. *Op. cit.*, hlm. 71.

⁹⁰ Locher-Scholten. *Op. cit.*, hlm. 70.

⁹¹ Kartodirdjo. *Op. cit.*, hlm. 118.

Dalam sistem pendidikan kolonial, golongan Eropa menempati posisi tertinggi. Hal tersebut terlihat dari keberadaan *Europeesche Lagere School* (ELS) yang berkembang pada awal tahun 1900-an sebagai sekolah khusus bagi anak-anak Eropa.⁹² Sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan sekolah lainnya. Kurikulum ELS mencakup pelajaran membaca, menulis, berhitung, ilmu pengetahuan modern, serta pembentukan pola berpikir rasional sesuai sistem pendidikan Barat.⁹³ Melalui sekolah tersebut, pemerintah kolonial berupaya mempertahankan kedudukan sosial golongan Eropa sekaligus mempersiapkan generasi yang mampu mendukung administrasi kolonial di Hindia Belanda.

Meskipun ELS diperuntukkan bagi golongan Eropa, pada praktiknya terdapat sebagian kecil masyarakat pribumi yang memperoleh kesempatan belajar di sekolah tersebut.⁹⁴ Kesempatan tersebut umumnya diberikan kepada anak-anak dari kalangan bangsawan atau elite birokrasi pribumi yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah kolonial. Akan tetapi, kesempatan tersebut sangat terbatas sehingga sebagian besar masyarakat pribumi tetap tidak dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang sama seperti golongan Eropa. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan kolonial masih mempertahankan batas sosial yang tegas antara golongan Eropa dan pribumi.

Selain ELS, pemerintah kolonial juga mendirikan *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) sebagai sekolah bagi masyarakat pribumi tertentu.⁹⁵ HIS mulai berkembang pada sekitar tahun 1907 dan menjadi salah satu lembaga pendidikan penting bagi pribumi yang memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan berbahasa Belanda.⁹⁶ Keberadaan HIS memberikan peluang bagi sebagian kecil masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dalam sistem pendidikan kolonial.

⁹² Van Niel. *Op. cit.*, hlm. 88.

⁹³ Noer. *Op. cit.*, hlm. 41.

⁹⁴ Blackburn. *Op. cit.*, hlm. 34.

⁹⁵ Van Niel. *Op. cit.*, hlm. 90.

⁹⁶ Ibid., hlm. 91.

Namun demikian, akses terhadap HIS masih sangat terbatas. Anak-anak dari kalangan priyayi dan elite pribumi lebih banyak memperoleh kesempatan memasuki sekolah tersebut dibandingkan masyarakat pribumi biasa.⁹⁷ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan kolonial tidak sepenuhnya bertujuan menciptakan pemerataan pendidikan, melainkan juga berfungsi mempertahankan struktur sosial kolonial yang telah terbentuk. Pendidikan pada masa tersebut menjadi alat seleksi sosial yang menentukan kelompok masyarakat tertentu untuk memperoleh kedudukan lebih tinggi dalam birokrasi kolonial.

Sebagian besar masyarakat pribumi pada periode 1901-1911 hanya memiliki akses terhadap *Volkschool* atau sekolah desa.⁹⁸ Sekolah tersebut memiliki masa pendidikan yang singkat, yaitu sekitar tiga tahun, dengan kurikulum yang terbatas pada kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.⁹⁹ Selain itu, sekolah desa juga memberikan keterampilan praktis yang dianggap berguna bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Dengan keterbatasan tersebut, *Volkschool* tidak dirancang untuk memberikan kesempatan mobilitas sosial yang luas bagi masyarakat pribumi.



Gambar 2. 3 Kegiatan Pembelajaran di *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* pada Masa Politik Etis, sekitar tahun 1905-1910

Sumber : KITLV Image Collection, KITLV A733.

⁹⁷ Shiraishi. *Op. cit.*, hlm. 57.

⁹⁸ Kartodirdjo. *Op. cit.*, hlm. 121.

⁹⁹ Noer, Loc. cit.

Gambar tersebut memperlihatkan kegiatan pembelajaran di *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS) pada masa penerapan Politik Etis sekitar tahun 1905 -1910. HIS merupakan salah satu sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda bagi masyarakat pribumi tertentu dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Foto tersebut menunjukkan perkembangan sistem pendidikan kolonial setelah diterapkannya Politik Etis tahun 1901. Meskipun pendidikan mulai diperluas bagi masyarakat pribumi, akses pendidikan pada masa tersebut masih dibedakan berdasarkan status sosial dan golongan masyarakat sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat memperoleh pendidikan dengan kualitas lebih baik.

Dalam sistem pendidikan kolonial, perempuan pribumi menghadapi keterbatasan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Pada sekitar tahun 1901-1911, perempuan pribumi tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan kolonial karena pemerintah Belanda lebih memfokuskan pendidikan bagi laki-laki yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan kolonial.¹⁰⁰ Akibatnya, kesempatan perempuan pribumi untuk memperoleh pendidikan formal jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan kolonial masih dipengaruhi oleh pandangan patriarki yang berkembang dalam masyarakat kolonial. Pendidikan perempuan belum dipandang sebagai kebutuhan penting karena perempuan dianggap lebih dekat dengan kehidupan domestik. Oleh karena itu, perkembangan pendidikan perempuan pribumi berjalan lebih lambat dibandingkan pendidikan laki-laki pribumi.

Perkembangan pendidikan kolonial pada masa Politik Etis secara perlahan mendorong munculnya kelompok perempuan pribumi terdidik pada periode 1905-1911.¹⁰¹ Kelompok perempuan tersebut mulai memperoleh kesempatan mengenal pendidikan modern dan memiliki kemampuan membaca serta menulis. Melalui perkembangan tersebut, mulai muncul kesadaran bahwa pendidikan dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kedudukan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat kolonial.

¹⁰⁰ Blackburn. *Op. cit.*, hlm. 36.

¹⁰¹ Vreede-de Stuers. *Op. cit.*, hlm. 79.

Kesadaran mengenai pentingnya pendidikan perempuan juga berkembang melalui media cetak dan organisasi sosial pada awal tahun 1900-an.¹⁰² Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan mulai dipandang sebagai bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan pribumi. Dengan adanya pendidikan, perempuan pribumi mulai memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan berpartisipasi lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kebijakan pendidikan kolonial pada masa Politik Etis menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan masih belum diberikan secara setara kepada laki-laki dan perempuan. Meskipun pemerintah kolonial mulai memperluas penyelenggaraan pendidikan sejak tahun 1901, akses pendidikan bagi perempuan pribumi masih terbatas dan jumlah sekolah yang menerima murid perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan sekolah untuk laki-laki. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan pribumi masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendidikan, baik yang berasal dari kebijakan kolonial maupun dari pandangan masyarakat yang masih menempatkan perempuan dalam ruang domestik.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa perempuan pribumi berada pada posisi paling bawah dalam hierarki sosial kolonial tersingkir sekaligus oleh sistem kolonial dan norma patriarki yang saling menopang. Dalam kerangka teori *circulation of elites*, kondisi ini menggambarkan posisi awal perempuan pribumi sebagai kelompok yang sama sekali berada di luar struktur kekuasaan, baik secara sosial maupun intelektual. Justru dari kondisi inilah kemudian lahir kelompok kecil perempuan terdidik yang mulai menggunakan pendidikan dan organisasi sebagai jalan masuk menuju posisi sosial yang sebelumnya tertutup bagi mereka..¹⁰³ Oleh karena itu, terbukanya akses pendidikan bagi perempuan pada masa Politik Etis dapat dipahami sebagai langkah awal yang mendorong terbentuknya kesempatan yang lebih setara dalam bidang pendidikan.

¹⁰² Kartowijono. *Op. cit.*, hlm. 18.

¹⁰³ Vilfredo Pareto, *Loc. cit.*

Meskipun pada awalnya pendidikan kolonial lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan Belanda, perkembangan pendidikan pada periode 1901-1911 turut mendorong tumbuhnya kesadaran baru di kalangan perempuan pribumi mengenai pentingnya pendidikan. Kesadaran tersebut menjadi dasar bagi munculnya keinginan perempuan untuk memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas serta memperjuangkan hak pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat kolonial.

2.4 Munculnya Kesadaran Pendidikan Perempuan Pribumi

Pada periode 1901-1911, perkembangan pendidikan kolonial di Hindia Belanda mulai memberikan pengaruh terhadap munculnya kesadaran pendidikan perempuan pribumi.¹⁰⁴ Pemerintah kolonial Belanda secara bertahap mulai membuka akses pendidikan bagi perempuan melalui pendirian beberapa sekolah khusus perempuan seperti *Meisjesschool* dan *Huishoudschool*.¹⁰⁵ Sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari perkembangan pendidikan pada masa Politik Etis yang mulai diterapkan sejak tahun 1901.¹⁰⁶ Meskipun akses pendidikan perempuan masih terbatas, keberadaan sekolah tersebut menjadi langkah awal berkembangnya pendidikan perempuan pribumi di Hindia Belanda.

Berbeda dengan pendidikan yang diberikan kepada laki-laki, pendidikan perempuan pada masa kolonial lebih diarahkan pada *huishoudonderwijs* atau pendidikan rumah tangga.¹⁰⁷ Kurikulum pendidikan perempuan lebih menekankan keterampilan praktis seperti memasak, menjahit, mengelola rumah tangga, dan tata krama sosial sesuai standar budaya Eropa.¹⁰⁸ Pola pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perempuan pada masa kolonial masih lebih diarahkan pada pembentukan keterampilan rumah tangga dibandingkan pengembangan kemampuan akademik secara lebih luas. Kondisi ini

¹⁰⁴ Locher-Scholten. *Op. cit.*, hlm. 72.

¹⁰⁵ Jean Gelman Taylor. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Haven: Yale University Press, 2003, hlm. 287.

¹⁰⁶ Kartodirdjo. *Op. cit.*, hlm. 124.

¹⁰⁷ Taylor. *Op. cit.*, hlm. 289.

¹⁰⁸ Ricklefs, *Op. cit.*, hlm. 327.

memperlihatkan bahwa akses pendidikan bagi perempuan masih dibatasi oleh pandangan yang menempatkan perempuan terutama sebagai pengelola kehidupan keluarga.

Meskipun demikian, keberadaan sekolah-sekolah perempuan secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi perempuan pribumi untuk mengenal pendidikan modern. Melalui pendidikan tersebut, sebagian perempuan pribumi mulai memperoleh kemampuan membaca, menulis, dan memahami perkembangan pemikiran baru mengenai pendidikan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat.¹⁰⁹ Perkembangan kesadaran pendidikan perempuan juga dipengaruhi oleh berkembangnya media cetak pada periode 1905-1911. Surat kabar dan majalah mulai memuat pembahasan mengenai pendidikan perempuan serta pentingnya peningkatan pengetahuan bagi perempuan pribumi.¹¹⁰ Media cetak kemudian menjadi sarana penting dalam penyebaran gagasan mengenai pendidikan perempuan di kalangan masyarakat pribumi terdidik. Melalui perkembangan tersebut, mulai muncul pandangan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan meningkatkan kemampuan intelektualnya.

Selain melalui pendidikan formal, kesadaran perempuan pribumi juga berkembang melalui munculnya kelompok perempuan terdidik pada awal tahun 1900.¹¹¹ Kelompok perempuan tersebut mulai berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan membentuk forum diskusi yang membahas persoalan pendidikan perempuan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perempuan pribumi mulai memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat kolonial.

¹⁰⁹ Blackburn. *Op. cit.*, hlm. 38.

¹¹⁰ Kartowijono. *Op. cit.*, hlm. 21.

¹¹¹ Vreede-de Stuers. *Op. cit.*, hlm. 82.



Gambar 2. 4 Potret Resmi Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.W.F. Idenburg, Periode 1909-1916

Sumber: KITLV Image Collection, KITLV 4578.

Gambar tersebut memperlihatkan potret resmi Alexander Willem Frederik Idenburg yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada periode 1909-1916. Dalam potret tersebut, A.W.F. Idenburg tampak mengenakan pakaian formal khas pejabat kolonial Belanda yang menunjukkan kedudukannya sebagai bagian dari elite birokrasi kolonial. Sebagai Gubernur Jenderal, Idenburg memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan Politik Etis, termasuk perkembangan pendidikan pada awal tahun 1900-an.

Pada masa pemerintahan A.W.F. Idenburg, perkembangan pendidikan perempuan mulai memperoleh perhatian meskipun masih terbatas.¹¹² Pemerintah kolonial mulai memperluas pendirian sekolah-sekolah perempuan seperti *Meisjesschool* dan *Huishoudschool* yang memberikan pendidikan dasar bagi perempuan pribumi.¹¹³ Akan tetapi, isi pendidikan di sekolah-sekolah tersebut masih lebih menekankan keterampilan rumah tangga dibandingkan pengembangan intelektual perempuan secara menyeluruh.

Perkembangan kesadaran pendidikan perempuan juga didukung oleh semakin aktifnya perempuan terdidik dalam memanfaatkan media cetak sebagai sarana bertukar gagasan dan menyampaikan pandangan mengenai pendidikan perempuan. Surat kabar dan majalah tidak hanya berfungsi sebagai media

¹¹² Taylor. *Op. cit.*, hlm. 291.

¹¹³ Ricklefs. *Op. cit.*, hlm. 329.

penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan dan peningkatan kedudukan perempuan dalam masyarakat kolonial.¹¹⁴

Perkembangan pendidikan perempuan pada periode 1901-1911 menunjukkan mulai terbukanya kesempatan bagi perempuan pribumi untuk memperoleh pendidikan formal meskipun akses tersebut masih terbatas. Bertambahnya perhatian terhadap pendidikan perempuan menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuhnya kesadaran baru mengenai pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kedudukan perempuan di masyarakat. Namun, kesempatan tersebut belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh perempuan pribumi karena masih adanya keterbatasan yang berasal dari sistem pendidikan kolonial serta pandangan sosial yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik.

Perkembangan tersebut mencerminkan proses penyadaran bertahap yang dalam kerangka teori *critical consciousness* dapat dipahami sebagai perpindahan dari tahap kesadaran magis di mana perempuan menerima keterbatasan sebagai sesuatu yang wajar menuju tahap kesadaran naif, di mana sebagian mulai menyadari bahwa keterbatasan tersebut bukan takdir, melainkan produk dari struktur sosial yang dapat dipertanyakan.¹¹⁵ Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tumbuhnya kesadaran perempuan mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kedudukan dan memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam masyarakat. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya gerakan perempuan pribumi pada periode berikutnya

Kesadaran bersama mengenai pentingnya pendidikan perempuan semakin berkembang melalui berbagai forum diskusi, organisasi sosial, dan media cetak pada awal abad ke-20.¹¹⁶ Perempuan-perempuan terdidik mulai memanfaatkan ruang publik untuk menyampaikan gagasan mengenai emansipasi dan pentingnya

¹¹⁴ Shiraishi, Op. cit., hlm. 51.

¹¹⁵ Paulo Freire, Op. cit., hlm. 35

¹¹⁶ Shiraishi. Op. cit., hlm. 58.

pendidikan perempuan. Mereka tidak hanya menjadi penerima pendidikan, tetapi juga mulai berperan sebagai kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan.

Perkembangan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya organisasi perempuan pada awal abad ke-20, termasuk Organisasi Poetri Mardika yang berdiri pada tahun 1912 dan menjadikan pendidikan perempuan sebagai salah satu fokus perjuangannya.¹¹⁷ Dengan demikian, perkembangan pendidikan kolonial yang awalnya bersifat terbatas justru turut mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan perempuan pribumi mengenai pentingnya pendidikan dan kesetaraan perempuan dalam masyarakat kolonial.

¹¹⁷ Vreede-de Stuers. *Op. cit.*, hlm. 85.